



**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TESIS

TOPO DASAWULAN

1620622154

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2019



**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

TOPO DASAWULAN

1620622154

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Topo Dasawulan

NRP : 1620622154

Tanggal : 3 Mei 2019

Jakarta, 3 Mei 2019

Yang Menyatakan,

 
Topo Dasawulan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Topo Dasawulan
NRP : 1620622154
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul
**: PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Mei 2019
Yang menyatakan


Topo Dasawulan

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Topo Dasawulan

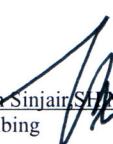
NRP : 1620622154

Program Studi : Magister Hukum

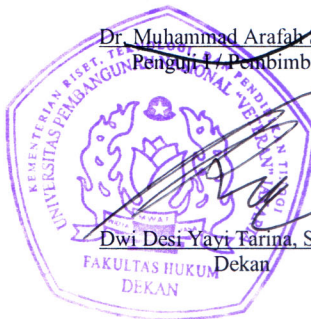
Judul Tesis : **PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.


Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N
Ketua Penguji


Dr. Muhammad Arafah Sinjair, S.H., M.Hum
Penguji I/ Pembimbing


Dwi Desi Yuyi Tarina, S.H., M.H.
Dekan




Dr. Muhammad Hatta, SH, MKn
Penguji II/ Pembimbing


Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 3 Mei 2019

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TOPO DASAWULAN

ABSTRAK

Intelijen kejaksaan melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? 2. Apa saja kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? 3. Bagaimana upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menghambat peran strategis Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 3. Untuk mengetahui upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara memiliki 3 (tiga) peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. 2. Kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu pertama dalam hal pemanggilan saksi. Kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait.

**ROLE OF INTELLIGENCE OF PROSPERITY OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA IN LAW ENFORCEMENT BY
REGULATION LEGISLATION**

TOPO DASAWULAN

ABSTRACT

Intelligence at the prosecutor's office conducts intelligence investigations, safeguards and raising activities to prevent criminal acts to support the enforcement of both preventive and repressive laws in the fields of ideology, politics, economics, finance, socio-culture, defense and security, carrying out preventive actions against certain people and / or participate in organizing public order and peace. The problems in this study are 1. What is the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning National Intelligence? 2. What are the obstacles that hinder the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning National Intelligence? 3. How do you increase the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning National Intelligence? While the purpose of this study is 1. To find out and analyze the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence. 2. To find out and analyze constraints that hinder the strategic role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence. 3. To find out the efforts to increase the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence. With the juridical normative research method, it is known that 1. The role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence has 3 (three) roles, namely the first, in the case of investigating corruption by Attorney General's intelligence services in order to obtain information and materials to proceed to the investigation process by the special criminal section. Second, namely preventive or preventive efforts by establishing Government Guards and Security Teams and Development based on the Attorney General's Order, and the three Prosecutors Intelligence roles in the search for prosecutors / court fugitives. 2. Constraints that hamper the role of the Prosecutor in law enforcement based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence, namely the lack of Human Resources possessed by the Prosecutor's Intelligence Section and the limited budget allocated while many cases must be handled. In handling cases of corruption, namely first in terms of calling witnesses. Second, the collection of evidence, and the fear of those who were questioned for the intervention of the relevant agencies.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati,Ak,CPMA,CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan selaku Pembimbing I.
4. Dr. Muhammad Arafah Sinjair,SH,M.Hum, Pembimbing II.
5. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
6. Seluruh rekan-rekan penulis baik di teman–teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional-UPN "Veteran" Jakarta.
7. Seluruh rekan-rekan, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta (bapak, ibu, suami dan anak tercinta dan tersayang yang masih ada di dalam kandungan yang selalu mendukung dan menemani bundanya untuk menyelesaikan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan) dan yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 3 Mei 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'T' and 'D'.

Topo Dasawulan

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
1.5.1. Kerangka Teori.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
II.1. Peran.....	17
II.1.1. Pengertian Peran.....	17
II.1.2. Teori Pidana.....	20
II.1.3. Perbedaan Peran dan Kedudukan	28
II.2. Intelijen.....	29
II.2.1. Pengertian dan Tujuan Intelijen	29
II.2.2. Teori Intelijen.....	33
II.2.3. Fungsi Intelijen.....	42
II.2.4. Tujuan Intelijen... ..	42
II.2.5. Landasan Yuridis Operasional Penyelenggaraan Intelijen.....	50
II.2.6. Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan Intelijen.....	51
II.2.7. Kegiatan Intelijen	56
II.2.8. Kemampuan yang dimiliki Intelijen.....	58
II.2.9. Teknis Operasional Intelijen	59
II.3. Penegakan Hukum.....	60
II.3.1. Pengertian Penegakan Hukum.....	60
II.3.2. Unsur dan Faktor Penegakan Hukum.....	61
II.3.3. Penegak Hukum dan Korupsi.....	72
II.4. Tindak Pidana Korupsi	74
II.4.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	74
II.4.2. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi	76
II.4.3. Peraturan yang Mengatur Tentang Korupsi	77
II.4.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Keuangan.....	79
II.5. Kejaksaan Republik Indonesia	80
II.5.1. Pengertian Kejaksaan	80
II.5.2. Kedudukan Kejaksaan.....	82
II.5.3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	83
II.5.4. Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan.....	87

BAB III METODE PENELITIAN	91
III.1. Tipe Penelitian.....	91
III.2. Jenis Penelitian	92
III.3. Sumber Data	92
III.4. Metode Pengumpulan Data	93
III.5. Metode Analisis data	94
 BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	 97
IV.1. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi	97
IV.1.1. Fungsi Intelijen Kejaksaan.....	97
IV.1.2. Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan oleh Intelijen Kejaksaan ...	99
IV.1.3. Tindakan Awal yang dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi	107
IV.1.4. Metode atau Teknik Penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi	108
IV.1.5. Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.....	110
IV.1.6. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Ditangani oleh Kejaksaan.....	111
IV.1.7. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan	113
IV.2. Kendala yang Menghambat Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara	114
IV.3. Upaya meningkatkan Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.....	117
 BAB V PENUTUP	 119
V.1. Kesimpulan	119
V.2. Saran	120
 DAFTAR PUSTAKA.....	 121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	